



Penerapan *Dynamic Governance* dalam Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Tangerang Selatan

Divania Yovina Putri¹, Mawar Mawar²

^{1,2} Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia

Jl. K.H Ahmad Dahlan, Cirendeu, Ciputat, Tangerang Selatan

Email : divaniayovina@gmail.com¹, mawar@umj.ac.id²

Abstract. *Green open space is one of the needs that cannot be ignored and is one of the elements of the city. The area of green open space in South Tangerang City has decreased because development continues to grow in each sub-district in South Tangerang City and the increase in population. Reduction of green open space caused by population density will automatically require building expansion. The purpose of this research is to find out and analyze the application of dynamic governance in the development of green open space in South Tangerang City. The method used in this research is descriptive research with a qualitative approach. This research uses theory with 3 indicators, think ahead, think again, and think across. Data collection techniques with observation, interviews, and documentation. Data analysis techniques with data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results showed that in the think ahead indicator, it can be said that the South Tangerang City Environmental Service has applied forward thinking because it is able to identify environmental developments, understand their implications and identify strategies needed to take advantage of new opportunities and prevent potential threats. In the thinking again indicator, it can be said that the Environment Agency of South Tangerang City has not used this thinking to achieve the desired solution in increasing the quantity of green open space. Where the percentage of green open space quantity in South Tangerang City from year to year is very slow to increase. In the thinking across indicator, it can be said that the Environment Agency of South Tangerang City has not done "learning from other cities" such as analyzing and then innovating practices that have been successfully implemented in a city. However, the Environment Agency of South Tangerang City is still trying to optimize the development of green open space in South Tangerang City.*

Keywords: *Green Open Space, Dynamic Governance, Development*

Abstrak. Ruang terbuka hijau adalah salah satu kebutuhan yang tidak dapat diabaikan dan merupakan salah satu elemen kota. Luas ruang terbuka hijau di Kota Tangerang Selatan mengalami penurunan karena pembangunan terus berkembang di setiap kecamatan di Kota Tangerang Selatan dan penambahan jumlah penduduk. Pengurangan ruang terbuka hijau diakibatkan oleh kepadatan penduduk otomatis akan membutuhkan perluasan bangunan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis mengenai penerapan *dynamic governance* dalam pengembangan ruang terbuka hijau di Kota Tangerang Selatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan teori dengan 3 indikator, *think ahead*, *think again*, dan *think across*. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknis analisis data dengan reduksi data, sajian data, dan penarikan simpulan. Hasil penelitian menunjukkan pada indikator *think ahead* dapat dikatakan Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan sudah berlaku berpikir kedepan karena mampu mengidentifikasi perkembangan lingkungan, memahami implikasinya dan mengidentifikasi strategi yang diperlukan untuk memanfaatkan peluang baru dan mencegah potensi ancaman. Pada indikator *thinking again* dapat dikatakan Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan belum menggunakan pemikiran ini untuk mencapai solusi yang diinginkan dalam meningkatkan kuantitas ruang terbuka hijau. Yang dimana presentase kuantitas ruang terbuka hijau di Kota Tangerang Selatan dari tahun ke tahun sangat lambat peningkatannya. Pada indikator *thinking across* dapat dikatakan Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan belum melakukan "belajar dari kota lain" seperti menganalisis lalu menginovasikan praktek yang telah berhasil diterapkan di suatu kota. Tetapi Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan tetap berupaya mengoptimalkan pengembangan ruang terbuka hijau di Kota Tangerang Selatan.

Kata kunci: Ruang Terbuka Hijau, *Dynamic Governance*, Pengembangan

1. LATAR BELAKANG

Negara dengan birokrasi pemerintahan dituntut merubah pola pelayanan diri birokratis eletis menjadi birokratis populis. Dimana sektor swasta sebagai pengelola

sumber daya dan birokrasi pemerintah pun harus memberikan kontribusi dalam usaha pengelolaan sumber daya yang ada. Penerapan cita good governance pada akhirnya mensyaratkan keterlibatan organisasi masyarakat sebagai kekuatan penyeimbang Negara.

Indonesia merupakan sebuah negara besar yang kaya akan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dapat bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Dalam upaya untuk mewujudkannya, Negara Indonesia berupaya melakukan serangkaian pembangunan dalam rangka pengembangan dan kemajuan daerah. Pembangunan yang dilakukan dapat terwujud dalam berbagai bentuk yang salah satunya adalah dalam bidang lingkungan.

Dalam melakukan pembangunan, aspek lingkungan harus diperhitungkan selama pembangunan dan perlunya perencanaan kota yang baik di setiap daerah. Salah satu bentuk intervensi pemerintah dalam mengelola kota dan wilayah untuk mencapai keseimbangan alokasi sumberdaya secara adil adalah dalam bentuk perencanaan tata ruang dan wilayah.

Sebagai pusat segala usaha dan aktivitas manusia, kota selalu menjadi tujuan dan daya tarik masyarakat. Kepentingan ini mendorong kota untuk terus membangun sarana dan prasarana yang memberikan kenyamanan hidup di perkotaan. Sarana dan prasarana yang akan dikembangkan untuk meningkatkan kenyamanan masyarakat adalah pembangunan ruang terbuka hijau, hutan kota sebagai tempat rekreasi.

Ruang terbuka hijau adalah bentuk ruang terbuka yang berfungsi sebagai keseimbangan antara daerah terbangun dan daerah terbuka. Kawasan terbangun seperti kawasan pemukiman atau bangunan. Ruang terbuka hijau memiliki misi yang berbeda, antara lain memberikan kualitas lingkungan untuk udara yang sehat, ruang untuk kehidupan yang nyaman dan interaksi sosial dan keindahan estetika lingkungan perkotaan.

Ruang terbuka hijau sebenarnya salah satu kebutuhan yang tidak dapat diabaikan dan merupakan salah satu elemen kota, dan kehasirannya dalam suatu kota didasarkan pada ketentuan dan standar-standar tertentu. Upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana ini pada wilayah perkotaan mejadi kebutuhan dan akibat terbatasnya sumber daya lahan maka akan terjadi konversi lahan hijau untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Salah satu praktik baik ruang terbuka hijau adalah *Greenroofs* di Stuttgart, Jerman. Stuttgart dikenal dengan inisiatif atap hijau yang membantu mengurangi efek pulau panas perkotaan dan meningkatkan keanekaragaman hayati. Pendekatan ini menunjukkan bagaimana inovasi dalam RTH dapat diimplementasikan dalam lingkungan perkotaan yang padat

Perubahan penggunaan lahan ini akan menyebabkan degradasi kualitas lingkungan. Selain itu, perkembangan ini akan mengakibatkan pula keberadaan ruang terbuka hijau kota sebagai salah satu komponen ekosistem kota menjadi kurang diperhatikan walaupun keberadaan ruang terbuka hijau kota diharapkan dapat menanggulangi masalah lingkungan di perkotaan (Zoer'aini dalam Rijal, 2019). Salah satu akibat langsungnya adalah berkurangnya keragaman vegetasi yang juga berpengaruh pada kondisi lingkungan yang semakin buruk. Kondisi lingkungan yang semakin buruk ini, dapat mempengaruhi pola tingkah laku dan kondisi kehidupan makhluk hidup khususnya manusia, sehingga ruang terbuka hijau yang ada harus diperhatikan dan diperluas serta diintensifkan fungsinya (Mangunsong dan Sihite dalam Rijal, 2019).

Dynamic governance telah menarik perhatian karena dianggap hal yang serius dan merupakan sesuatu hal yang perlu dipertimbangkan, dianalisa dan membuahkan hasil yaitu kerangka berpikir. Neo dan Chen mendiskusikan dan mengkonseptualisasikan tiga kemampuan suatu pemerintahan yaitu: *think ahead*, *think again* dan *think across* (Gafar, 2019). Konsep dasar *dynamic governance* adalah mengkombinasikan antara budaya dengan kapabilitas yang menghasilkan perubahan. Budaya menunjukkan keyakinan dan nilai-nilai kelompok tertentu yang dibagi atau dimiliki bersama, sehingga dapat dianggap sebagai akumulasi pelajaran bersama.

Permen Kementrian Agrarian dan Tata Ruang Kepala Badan Pertahanan Nasional (ATRKBPN) 14 Tahun 2022 tentang Ruang Terbuka Hijau. RTH merupakan terobosan penyediaan Ruang Terbuka Hijau karena Pemerintah Daerah mengalami kendala pemenuhan 20% Ruang terbuka Hijau dari luas Wilayah Kota. Berdasarkan mitigasi perubahan iklim dan pencapaian misi nol emisi karbon (*net zero emission*) maka Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan ruang terbuka hijau yang berkualitas. (Joglo Abang.com, Mei 2023)

RTH eksisting di Kota Tangerang Selatan didapat dari hasil digitasi yang dilakukan secara manual tutupan vegetasi atau lahan hijau menggunakan data Citra Satelit Pleiades tahun 2018. Berdasarkan hasil perhitungan didapat bahwa luas RTH eksisting di Kota Tangerang Selatan adalah 39,968 Km² atau sebesar 3996,85 Ha. Dilihat dari luas wilayah Kota Tangerang Selatan, luas RTH eksisting tersebut berada di angka 27,154%. RTH eksisting Per Kecamatan dari hasil overlay peta RTRW Kota Tangerang Selatan dan digitasi Citra Pleiades tahun 2017.

Tabel 1 Hasil Perhitungan

Kecamatan	Jml RTH	Luas wilayah (km ²)	Luas RTH (km ²)	Persentase RTH (%)
Setu	7	14,8	5,54	37,43
Serpong	6	24,04	9,81	40,80
Pamulang	7	26,82	5,18	19,31
Ciputat	6	18,38	4,56	24,80
Ciputat timur	2	15,43	3,03	19,63
Pondok aren	9	29,88	5,65	18,90
Serpong utara	2	17,84	6,16	34,52
Total	39	147.19	39,93	27,12

Berdasarkan hasil digitasi citra satelit Pleiades tahun 2018 yang telah digabungkan dengan data RTRW Kota Tangerang Selatan, maka diketahui luasan RTH eksisting sebesar 39,93 Km² atau 3.993 Ha dengan presentase ruang terbuka hijau sebesar 27,12%. Maka RTH di Kota Tangerang Selatan belum memenuhi luas RTH di Kota Tangerang Selatan yang seharusnya seluas 44,15 km² dan belum memenuhi kriteria 30% dari luas wilayah seluruhnya.

Luas ruang terbuka hijau di Kota Tangerang Selatan mengalami penurunan karena pembangunan terus berkembang di setiap kecamatan di Kota Tangerang Selatan dan penambahan jumlah penduduk. Pengurangan ruang terbuka hijau diakibatkan oleh kepadatan penduduk otomatis akan membutuhkan perluasan bangunan (Khasanah & Priyatmono, 2018).

Pemanfaatan RTH di Kawasan Perkotaan dijelaskan bahwa luas RTH kota minimum tersebut merupakan ukuran minimum untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota, baik keseimbangan sistem hidrologi dan keseimbangan mikrolat, maupun sistem ekologis lain yang dapat meningkatkan ketersediaan udara bersih, serta dapat meningkatkan nilai estetika kota. Pembinaan ruang terbuka hijau harus mengikuti struktur nasional atau daerah dengan standar-standar yang ada. Hal ini tentunya dapat mempengaruhi aspek-aspek sosial, ekonomi, dan budaya dari masyarakat sekitar.

Menurut Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Bangunan dan Penataan Ruang Kota Tangerang Selatan Tahun 2021- 2026, target penyediaan ruang terbuka hijau di tahun 2023 adalah 4,3% = 708,8 Ha. Target di tahun 2024 adalah 4,6% = 758,3 Ha.

2. KAJIAN TEORITIS

Judul Penelitian “*Dynamic Governance* Dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Makassar”. Tujuan penelitian untuk mengetahui pelaksanaan Ruang Terbuka Hijau berdasarkan *Thinking ahead, thinking again, thinking across*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Thinking ahead* (berpikir kedepan) dalam Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP) mengharuskan setiap kota memiliki lahan terbuka hijau seperti taman perkotaan dan hutan kota minimal 30%. *Thinking again* (Berpikir lagi) yang dilakukan pemerintah kota masih kesulitan dalam memenuhi target RTH dimana kota Makassar masih dibawah 10 % dari 30 % persyaratan yang ada. *Thinking across* (berpikir lintas batas) yang dilakukan oleh pemerintah bahwa evaluasi yang perlu diperkuat adalah komitmen bersama untuk menambah luas lahan agar mencapai 30% luas lahan terbuka hijau kota selain itu perlunya peningkatan peran pemerintah, swasta dan masyarakat yang sinergis untuk mengoptimal Lahan Terbuka Hijau Kota Makassar.

Konsep dari *Dynamic Governance* sebagai kemampuan pemerintah untuk terus menyesuaikan kebijakan dan program terhadap masyarakat, sehingga kepentingan jangka panjang sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan (Porter,2007:8). Konsep teori *Dynamic Governance* mencerminkan upaya pemimpin yang dengan sengaja untuk membentuk masa depan mereka. Adapun konsep dasar *Dynamic Governance* adalah mengkombinasikan budaya dengan kapabilitas sehingga dapat menghasilkan perubahan ke arah yang lebih baik Oleh karena itu dalam konsep *Dynamic Governance*, pemimpin harus berpikir secara cerdas dan taktis dengan mengartikulasikan ide-idenya. Penelitian ini menggunakan teori Neo dan Chen 2007, yang mana terdapat tiga kapabilitas dalam dynamic governance, yaitu :

- *Think ahead* (berpikir kedepan) kemampuan menganalisa kondisi di masa depan yang penuh dengan ketidakpastian dari lingkungan eksternal dengan melihat peluang-peluang baru dan potensi ancaman yang ada. Kemampuan ini membuat sebuah institusi dapat memprediksikan perkembangan di masa depan. Hal ini akan berdampak pada pencapaian tujuan dari institusi pemerintah untuk mengatur negaranya.
- *Think again* (berpikir lagi) kemampuan mengevaluasi dan mengidentifikasi perubahan kebijakan yang telah ditetapkan agar memperoleh hasil dan kualitas yang lebih baik. Sehingga intitusi dapat mengemukakan permasalahan dan isu yang dihadapi, dan melihat bagaimana cara untuk meningkatkan performa institusi tersebut. Hal ini membutuhkan efesiensi dan efektifitas kebijakan yang telah dibuat dan juga ketepatan dalam penjapaian tujuan dan penetapan strategi.

- *Think across* (berpikir lintas batas) kemampuan melintasi batas-batas tradisional untuk “berpikir diluar batas”, juga untuk “belajar dari orang lain” apabila terdapat ide-ide bagus yang dapat diadopsi dan diadaptasi sebagai inovasi baru dalam pembuatan kebijakan. Itu seperti meng-copy aturan dan kegiatan/ praktek yang telah berhasil diterapkan di suatu tempat. Hal ini mengizinkan transfer pengetahuan antar negara dengan mengadopsi program dari suatu negara dan disematkan kedalam institusi lokal dan lingkungan kebijakan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode dan pendekatan ini dipilih dengan tujuan untuk memperoleh gambaran tentang permasalahan yang akan diteliti secara mendalam dan apa adanya tentang Penerapan *Dynamic Governance* Dalam Pengembangan Ruang Terbuka Hijau di Kota Tangerang Selatan.

Menurut Sugiyono (2017:9) Metode kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci.

Data kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk dokumen pribadi, catatan lapangan, ucapan dan tindakan, responden dan dokumen dan lain lai (Sugiyono, 2017:15).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dynamic governance yang dikenal saat ini merupakan satu kemampuan pemerintah untuk terus menyesuaikan kebijakan dan program publik, serta pola mengubah cara kebijakan publik tersebut dirumuskan dan dilaksanakan, sehingga berdampak pada kepentingan jangka panjang dicapai. Kondisi kedinamisan dalam pemerintahan sangat penting bagi pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan terutama pada lingkungan yang mengalami ketidakpastian dan perubahan yang cepat dimana masyarakat yang semakin menuntut kecanggihan, lebih berpendidikan, dan lebih terdampak globalisasi.

Dalam konteks pengelolaan RTH, penerapan konsep *dynamic governance* menjadi relevan. *Dynamic governance* adalah pendekatan tata kelola yang adaptif dan fleksibel, memungkinkan partisipasi yang lebih luas dari berbagai pemangku kepentingan serta respons yang cepat terhadap perubahan dan tantangan. Studi ini bertujuan untuk

mengeksplorasi bagaimana penerapan *dynamic governance* dapat mendukung pengembangan RTH yang efektif dan berkelanjutan.

Pembahasan ini berisi data dan fakta yang diperoleh dari penelitian di lapangan yang akan disesuaikan dengan 3 indikator menurut Neo & Chen (2007) mengenai *dynamic governance* yaitu *think ahead*, *think again*, dan *think across*.

Think Ahead

Pada indikator *think ahead* dapat dikatakan Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan sudah berlaku berpikir kedepan karena mampu mengidentifikasi perkembangan lingkungan, memahami implikasinya dan mengidentifikasi strategi yang diperlukan untuk memanfaatkan peluang baru dan mencegah potensi ancaman. Seperti, kuantitas ruang terbuka hijau memang belum meningkat tetapi Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan melakukan cara untuk mengembangkan ruang terbuka hijau dengan meningkatkan kualitasnya terlebih dahulu agar tetap terwujudnya ruang terbuka hijau yang nyaman untuk masyarakat. Namun, masih ada beberapa hal seperti alat olahraga dan mainan anak yang harus diperbaiki dan ditambah kuantitasnya.

Think Again

Pada indikator *thinking again* dapat dikatakan Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan belum menggunakan pemikiran ini untuk mencapai solusi yang diinginkan dalam meningkatkan kuantitas ruang terbuka hijau. Yang dimana presentase kuantitas ruang terbuka hijau di Kota Tangerang Selatan dari tahun ke tahun sangat lambat peningkatannya.

Think Across

Pada indikator *thinking across* dapat dikatakan Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan belum melakukan “belajar dari kota lain” seperti menganalisis lalu menginovasikan praktek yang telah berhasil diterapkan di suatu kota. Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan tetap menggunakan kebijakan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Tetapi Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan tetap berupaya mengoptimalkan pengembangan ruang terbuka hijau di Kota Tangerang Selatan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP) mengharuskan setiap kota memiliki lahan terbuka hijau seperti taman perkotaan dan hutan kota minimal 30%. Peran pemerintah dalam meningkatkan kualitas RTH masih dalam tahap proses, karena masih adanya kendala pada bagian lahan

akan tetapi pemerintah berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan kenyamanan masyarakat di taman macan sehingga kebersihan sudah mulai terjaga dan dapat dinikmati untuk bersantai dan olahraga. Sebaiknya Dinas Lingkungan Hidup mengadakan peninjauan yang dilakukan dengan memaksimal mungkin, pendataan dan mengupdate kembali ruang terbuka hijau dan juga mengadakan sosialisasi publik terkait pentingnya menjaga keseimbangan dan keberlangsungan lingkungan kota dengan melakukan inventarisasi wilayah-wilayah yang termasuk sebagai ruang terbuka hijau.

DAFTAR REFERENSI

- Albaroza, A. I., Salahudin, S., & Sihidi, I. T. (2021). Pengembangan tata kelola ruang terbuka hijau: Sebuah kajian pustaka terstruktur. *Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton*.
- Bhatta, G. (2005). *International dictionary of public management and governance*. M.E. Sharpe.
- Chhotray, V., & Stoker, G. (2009). *Governance theory and practice*. Palgrave Macmillan UK.
- Dwiyanto, A. (2021). *Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik*. UGM Press.
- Fajri, Y. K., Khaerah, N., & Razak, F. S. H. (2020). Dynamic governance dalam pengelolaan ruang terbuka hijau di Kota Makassar. *Journal of Government and Politics (JGOP)*, 2(2), 104–112.
- Firianti, W. R. (2019). Pengembangan ruang terbuka hijau kawasan Sungai Winongo di Kricak Kota Yogyakarta. *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*, 5(1), 67–80.
- Ginanjari, W. R., & Mubarroq, A. Z. (2020). Civil society and global governance: The indirect participation of Extinction Rebellion in global governance on climate change. *Journal of Contemporary Governance and Public Policy*, 1(1), 41–52. <https://doi.org/10.46507/jcgpp.v1i1.8>
- Hamidah, N., Santoso, M., & Hut, S. (2022). *Arsitektur kota, perancangan kota, dan ruang terbuka hijau*. Deepublish.
- Hotimah, O. (2022). *Ruang terbuka hijau, pendidikan lingkungan, dan pariwisata*. Pt RajaGrafindo Persada.
- Huraerah, A. (2022). *Kebijakan perlindungan sosial: Teori dan aplikasi dynamic governance*. Nuansa Cendekia.
- Kasim, A. (2015). *Merekonstruksi Indonesia: Sebuah perjalanan menuju dynamic governance* (Cetakan ke-1). Gramedia.
- Kompasiana. (2015). Ruang terbuka hijau Kota Tangerang Selatan. Retrieved from <https://www.kompasiana.com/gapey-sandy/560ab4515493731b0ea8cd4d/ruang->

[terbuka-hijau-kota-tangsel-ruang-publik-untuk-semua?page=all&page_images=1](#) (Diakses 20 April 2023).

Neo, B. S., & Chen, G. (2014). *Dynamic governance: Embedding culture, capabilities and change in Singapore* (Cetakan ke-3). World Scientific Publishing.

Peraturan Daerah Tangerang Selatan No. 15 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) No. 14 Tahun 2022 tentang Ruang Terbuka Hijau.

Pratiwi, R. (2022). *Kemampuan ruang terbuka hijau dalam mereduksi CO₂*. Penerbit NEM.

Purnomohadi, N. (2010). *Ruang terbuka hijau sebagai unsur utama tata ruang kota*. Direktorat Jenderal Penataan Ruang.

Sinatra, F., Azhari, D., Asbi, A. M., & Affandi, M. I. (2022). Prinsip pengembangan ruang terbuka hijau kota sebagai infrastruktur hijau di Kota Bandar Lampung. *Jurnal Planologi*, 19(1), 19–36.

Triana, D. (2019). Strategi peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengembangan ruang terbuka hijau di Kota Makassar. *Jurnal Lanskap Indonesia*, 11(2), 43–47.